

Kontribusi Model *Education Sustainable Development* dalam Pembelajaran PKn Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan

Diana Noor Anggraini

Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia
Pos-el : didiedyana@yahoo.co.id

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi mempersiapkan orang-orang muda untuk berperan dan bertanggung jawab sebagai warga negara dan secara khusus termasuk di dalamnya (melalui sekolah, pengajaran dan pembelajaran) dalam proses persiapan warga Negara. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi penuh sebagai jalan pembangunan secara berkelanjutan dalam mewujudkan isu pembangunan ini dengan melibatkan partisipasi warga Negara di dalamnya. Secara konseptual, model *Education Sustainable Development* (ESD) merupakan sistem aktivitas pengembangan sumber daya manusia secara sadar melibatkan generasi satu dengan generasi lainnya yang mencakup keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*), keberlanjutan sosial (*social sustainability*), keberlanjutan budaya (*cultural sustainability*), dan keberlanjutan ekologi (*ecology sustainability*). Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui sistem pendidikan dalam sebuah perspektif belajar sepanjang hidup (*lifelong learning*) dimulai dari usia dini hingga sampai pada usia dewasa. Model ESD menuntut reorientasi pendekatan pendidikan yang mencakup struktur atau isi kurikulum, tujuan, metode, dan evaluasi. Secara sistemik, pendidikan pembangunan berkelanjutan untuk pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam pembelajaran PKn mampu mengembangkan pengetahuan yang segar (*civic knowledge*) bagi siswa, mengembangkan bakat yang ada dan menyampaikan keterampilan yang berguna (*civic skill*), sehingga dapat membantu peserta didik mengembangkan jenis kualitas hidup yang melibatkan rasa hormat tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk sumber daya, fauna dan flora yang ada di planet ini (*civic disposition*).

Kata kunci : Model *Education Sustainable Development* (ESD), Pembelajaran PKn, Kompetensi Kewarganegaraan

Abstract

Civic Education has contributes to preparing young people for play a role and be responsible as citizens and exclusively including (through school, teaching and learning) in the preparation process of citizens. Civic Education has full contribution as a way of sustainable development in accommodating this development issues by involving citizen participation. Conceptually, the Education Sustainable Development (ESD) model is a system of human resource development activities that consciously involve one generation with other generations that include economic sustainability, social sustainability, cultural sustainability and ecology sustainability. Human resource development is done through the education system in a lifelong learning perspective starting from the age of early until the age of adults. The ESD model demands a reorientation of educational approach that includes the structure or content of the curriculum, objectives, methods, and evaluations. Systemically, education sustainable development for the development of civic competencies in civics learning be able to develop civic knowledge for students, develop existing talents and impart civic skill, so as to help learners develop a quality of life that involves respect not only for humans but for the resources, fauna and flora of the planet (civic disposition).

Keywords : The *Education Sustainable Development* (ESD) model, Civics Learning, Civic Competencies

Pendahuluan

Hakekat pendidikan dipandang pula sebagai perilaku budaya dan merupakan kegiatan antar generasi. Artinya kegiatan pendidikan melibatkan generasi tua dan muda, dalam rangka mendorong yang muda menjadi warga masyarakat cerdas dan berbudaya (Dimiyati, 1989). Hal ini mencerminkan bahwa perlu adanya keberlanjutan sebagai tali penyambung antara generasi sebelumnya ke generasi berikutnya untuk menggerakkan visi moral dalam membangun diversitas budaya yang mengikat tujuan-tujuan pembangunan secara universal.

Atas dasar ini, maka konsep dan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) kemudian mulai mendapat perhatian oleh semua kalangan, baik di tingkat nasional maupun global. Konsep dan paradigma ini mencoba mengakomodasi berbagai paradigma pembangunan, baik yang berasal dari pendukung paradigma pertumbuhan ekonomi, maupun dari kelompok pendukung paradigma lingkungan hidup dan sosial-budaya. Konsep dan paradigma pembangunan berkelanjutan juga sangat memperhatikan nasib generasi mendatang, karena dengan mengadakan pembangunan di bidang ekonomi, otomatis menggunakan sumber daya alam secara tidak terkontrol (Tjokrowinoto, 2002, hlm. 11).

Gerakan ini didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014 bahwa: Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai budaya, tanggungjawab sosial dan lingkungan alam/natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, hlm. 7)

Sekalipun Renstra Pengembangan Pendidikan Nasional (2010-2014) tidak secara eksplisit menyatakan komitmen terhadap ESD, tetapi pada dasarnya pendidikan nasional Indonesia didedikasikan pada keseluruhan aspek pembangunan nasional, khususnya pengembangan SDM yang bersesuaian dengan tuntutan pembangunan dalam konteks globalisasi. Oleh karenanya pengembangan dan implementasi konsep ESD di Indonesia, baik pada tataran kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan, perlu memperoleh perhatian dari semua kalangan pendidikan. Kepentingan ini bukan semata-mata didorong oleh komitmen politik Pemerintah, melainkan juga menjadi bagian dari upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan berkelanjutan yang dihadapi bangsa kita.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi penuh sebagai jalan pembangunan secara berkelanjutan dalam mewujudkan isu keberagaman ini dengan melibatkan partisipasi warga Negara di dalamnya. Hal ini didukung pandangan Walson-Jack (1999) dalam penelitian Olibie dan Akudolu (2013) bertajuk tentang *Toward a Functional Citizenship Education Curriculum in Nigerian Colleges of Education for Sustainable Development in the 21st Century*. Beliau mencatat bahwa “a world class citizenship education is essential to combating the fear, the ignorance, the prejudice, and apathy that undermine freedom today in form of ethnic, religious, racial and economic depressions”. Maka dapat didefinisikan bahwa pendidikan kewarganegaraan di kelas dunia sangat penting untuk memerangi ketakutan, kebodohan, prasangka, dan apatis yang melemahkan kebebasan saat ini berupa depresi etnis, agama, ras, dan ekonomi.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk ideal berusaha untuk melibatkan warga dalam komunitas masyarakat dan sekolah dengan mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat sipil. *Citizenship education in its ideal form seeks to engage citizens in their communities and schools by teaching them the skills necessary to effectively participate in civil society. Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and respon-*

sibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process (Kerr, 2004). Hal ini berarti tersebut.

Oleh karena itu, Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedekatan yang erat dengan *Education for Sustainable Development* yang menurut UNESCO (2009, hlm.1) memungkinkan warga negara untuk mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang cara kita melakukan sesuatu, secara individu dan kolektif, baik lokal maupun global, yang akan meningkatkan kualitas hidup sekarang tanpa merusak planet ini untuk masa depan.

Untuk tujuan tersebut, pendidikan kewarganegaraan secara fungsional harus menyampaikan pengetahuan yang segar (*civic knowledge*), mengembangkan bakat yang ada dan menyampaikan keterampilan yang berguna (*civic skill*), sehingga dapat membantu peserta didik mengembangkan jenis kualitas hidup yang melibatkan rasa hormat tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk sumber daya, fauna dan flora yang ada di planet ini (*civic disposition*) yang tergabung dalam kompetensi kewarganegaraan yang dimiliki warga negara seutuhnya.

Pengembangan kompetensi kewarganegaraan ini harus menimbulkan pemahaman di antara murid bahwa pembangunan nasional membutuhkan kontribusi yang bertanggung jawab dari masing-masing individu terlepas pangkat dan status dalam masyarakat. Pada dasarnya, ciri-ciri karakter privat dan publik seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan menghormati nilai dan manusia martabat setiap individu serta menghormati fauna dan flora di planet ini tidak hanya penting dalam pendidikan kewarganegaraan tetapi juga beberapa nilai yang melekat dalam ESD (*Education for Sustainable Development*).

Metode

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan kualitatif-kuantitatif dengan pola “*the dominant-less dominant design*” dari Creswell (1994:177). Bagian pertama dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melalui metode deskriptif dan kedua menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Pendekatan kualitatif dijadikan sebagai pendekatan yang dominan dalam penelitian ini karena menggambarkan sekumpulan model pembelajaran dan dampak instruksional mengenai perilaku, pengalaman, atau karakteristik dari suatu fenomena.

Lokasi penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandung Jalan Sumatra No. 40 Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan populasi siswa SMPN 5 Bandung dan sampel dua kelas sebagai uji coba.

Tabel 1. Sampel Kelas VII SMPN 5 Bandung

Kelas	L	P	Jumlah
VII-G	15	19	34
VII-I	16	18	34
Jumlah	31	37	86

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 1) observasi; 2) wawancara; 3) studi dokumen; dan 4) angket sebagai pengumpul data kuantitatif. Analisis data kualitatif menggunakan 1) reduksi data; 2) kategorisasi dan klasifikasi; (3) display data; (4) *cross site analysis*; dan (5) menyajikan temuan, menarik kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi bagi pengembangan. (Fraenkel dan Wallen, 1993: 399-403). Analisis kuantitatif dilakukan untuk data yang terkumpul melalui angket, dengan menggunakan korelasi-regresi (Sugiyono, 2009).

Pembelajaran *Educational Sustainable Development*: Kerangka dan Isi

ESD merupakan konsep dinamis yang mencakup sebuah visi baru pendidikan yang mengusahakan pemberdayaan orang segala usia untuk turut bertanggung jawab dalam menciptakan sebuah masa depan berkelanjutan. ESD tidak bermakna sama dengan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan atau sekedar transfer pengetahuan. ESD berurusan dengan upaya mengubah perilaku dan gaya hidup kita bagi transformasi masyarakat yang positif (Balitbang Depdiknas, 2009, hlm. 6).

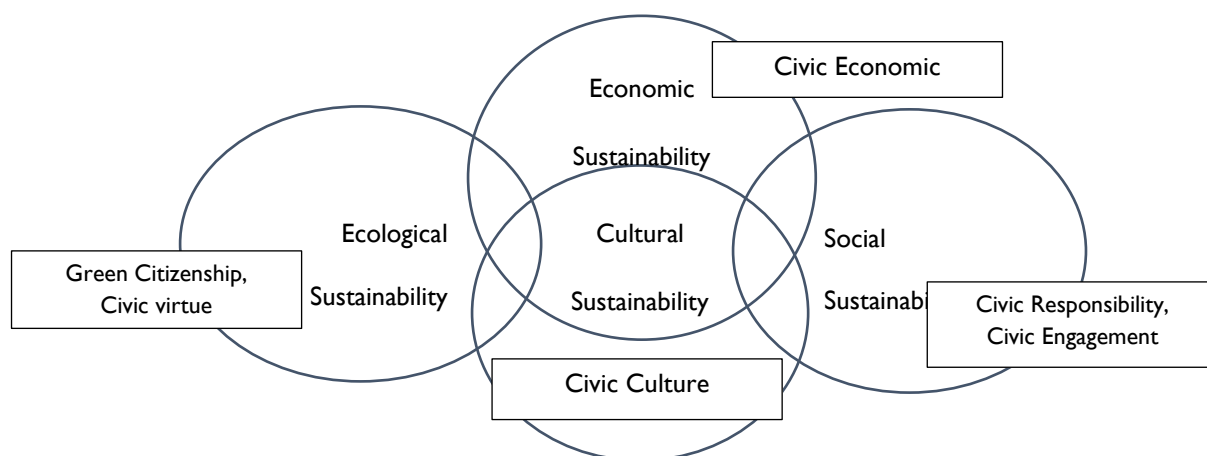
Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan

dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem.

Paradigma keberlanjutan adalah perubahan besar dari paradigma pembangunan ekonomi dengan konsekuensi sosial dan lingkungan yang merusak. Sampai saat ini konsekuensi ini telah dilihat sebagai tak terelakkan dan diterima. Namun, kami sekarang menyadari bahwa kerusakan merupakan ancaman besar bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan dalam pembangunan. Kami kemudian bertanya, apa perbedaan antara pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan? Keberlanjutan sering dianggap sebagai tujuan jangka panjang (yaitu dunia yang lebih berkelanjutan), sementara pembangunan berkelanjutan mengacu pada banyak proses dan jalur untuk mencapai itu misalnya pertanian berkelanjutan dan kehutanan, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik, penelitian dan transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan, dll (Jutvik, G., & Liepina, 2007).

Secara konseptual, model *Education Sustainable Development* (ESD) merupakan sistem aktivitas pengembangan sumber daya manusia secara sadar melibatkan generasi satu dengan generasi lainnya yang mencakup keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*), keberlanjutan sosial (*social sustainability*), keberlanjutan budaya (*cultural sustainability*), dan keberlanjutan ekologi (*ecology sustainability*).

Keempat komponen keberlanjutan tersebut sejalan dengan tujuan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan dapat membangun generasi bangsa di masa yang akan datang. Berikut gambaran keterkaitan komponen pembangunan berkelanjutan dengan kompetensi kewarganegaraan.



Gambar 1. Keterkaitan Komponen Pembangunan Berkelanjutan dengan Kompetensi Kewarganegaraan

Keberlanjutan ekonomi - berarti bahwa semua proses dan proyek yang dilakukan harus memberikan output sebesar mungkin dan manfaat dari pembangunan tersebut hendaknya didistribusikan antara generasi. Yang perlu dipahami adalah pemba-

ngunan menentukan kualitas prestasi ekonomi, konservasi sumber daya dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi, dan konsumsi barang dan jasa. Salah satu kecenderungan adalah ekonomi sumber daya dalam produksi, atau memilih dan penggunaan

sumber daya terbarukan dan teknologi. Degradasi sumber daya alam dengan demikian dicegah, meskipun fakta bahwa pendapatan nasional meningkat. Ini berarti perubahan dalam pembangunan nasional nampak pada peningkatan kualitas hidup manusia dan perubahan perilaku. Dengan kata lain, kesejahteraan berkelanjutan manusia menentukan perubahan perilaku dan nilai-nilai.

Manajemen ekonomi yang berkelanjutan tergantung pada kebijakan masa kini atau tindakan yang berkompromi tentang pembangunan masa depan. Keberlanjutan ekonomi termasuk manfaat ekonomi bagi generasi yang akan datang. Warisan budaya dan lingkungan harus dimasukkan dalam model pembangunan ekonomi. Penggunaan teknologi ekologis dan hemat sumber daya, investasi dan subsidi produk ekologis bersih, dan ramah lingkungan kebijakan nasional dan perpajakan, semua bagian dari keberlanjutan ekonomi.

Keberlanjutan sosial - berarti bahwa pembangunan harus meningkatkan kontrol rakyat atas kehidupan mereka dan semua kelompok sosial harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini berarti pengembangan masyarakat secara keseluruhan, keterlibatan semua kelompok sosial dalam keputusan dan partisipasi semua orang dalam pembangunan yang berkelanjutan. Perspektif sosial termasuk etika ekologi, kualitas hidup, kesejahteraan dan perawatan untuk generasi mendatang dan budaya lain. pembangunan sosial, atau perspektif sosial dari pembangunan berkelanjutan, mencari jawaban untuk pertanyaan yang berkaitan dengan peran manusia di alam semesta, dan meliputi aspek moral dan etika. Tujuannya adalah berkontribusi pada keharmonisan ekosistem dan hubungan dengan masyarakat kita.

Keberlanjutan budaya - berarti bahwa keragaman kelompok budaya harus dipertahankan dan didorong dari nilai warisan dan tradisi mereka yang diakui. Ini mengharuskan setiap perkembangan mengambil nilai-nilai dari orang dan berbagai kelompok budaya yang harus dipertahankan dan didorong agar nilai warisan dan tradisi mereka sepenuhnya diakui. Budaya berkaitan dengan cara-cara menjadi, berkaitan, berperilaku, percaya dan bertindak yang berbeda sesuai dengan konteks, sejarah dan tradisi, dan dimana manusia menjalani kehidupan mereka. Pengakuan praktek, identitas dan nilai-nilai - perangkat lunak pembangunan manusia - memainkan peran yang cukup besar dalam menentukan arah dan membangun komitmen bersama.

Kehidupan manusia juga ditentukan oleh warisan dan sikap terhadap lingkungan budaya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, sifat manusia mengeks-

presikan dirinya dalam budaya. Keberlanjutan budaya meliputi eksplorasi, pelestarian dan pengembangan warisan dan tradisi yang berkaitan dengan sejarah peradaban. Identitas budaya lebih jauh berkelanjutan daripada identitas pasar. Kita dapat merusak pasar dan mengubah pemerintah, tetapi identitas budaya tetap konstan dan menjamin kelangsungan hidup orang, serta negara dan ekonominya.

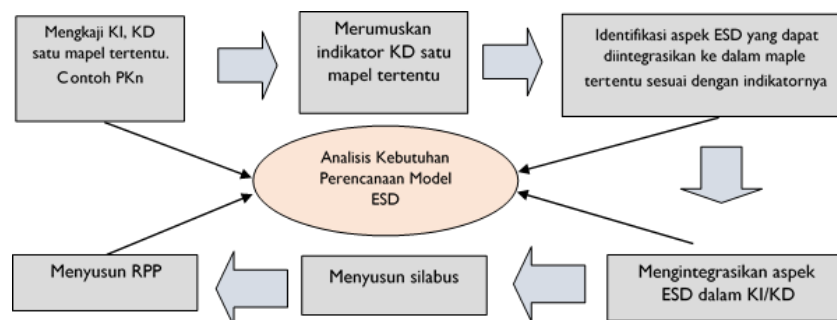
Keberlanjutan ekologi - berarti bahwa masyarakat perlu mengakui bahwa kelangsungan hidup dan kesejahteraan spesies lainnya adalah proses alami yang mendasar. Pandangan ekologi melebar pada konsep tindakan moral dan menekankan tanggung jawab untuk merawat organisme hidup. Dasar keberlanjutan ekologis adalah pemahaman model ekosistem umum dimana semua sistem di bumi yang saling terkait harus dijaga dan dipelihara. Bumi dapat dilihat sebagai suatu sistem yang mengatur diri sendiri dimana semua komponen merupakan sesuatu yang berharga. Hal ini perlu menempatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam praktek melibatkan mempromosikan, mendorong dan mengembangkan kesadaran lingkungan masyarakat kita, partisipasi masyarakat dan gaya hidup ramah lingkungan.

Implementasi Model ESD dalam Pembelajaran PKn

Perencanaan

Pelaksanaan Model ESD dalam pembelajaran PKn terlebih dahulu dilakukan perencanaan yakni menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Peneliti bersama guru PPKn melakukan *Focus Group Discussion* untuk merencanakan pembelajaran PKn berbasis ESD dengan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (a) Mengkaji dan menganalisis KI dan KD, (b) Menjabarkan KI dan KD menjadi rumusan indikator pencapaian kompetensi, (c) Menganalisis kedalaman materi dari masing-masing indikator, (d) Menganalisis nilai-nilai ESD dari tiga perspektif yang memungkinkan dapat diintegrasikan dengan indikator, (e) Memilih model pembelajaran terpadu yang relevan dengan hasil analisis, (f) Mengintegrasikan nilai-nilai ESD dari tiga perspektif dalam indikator dengan menggunakan model pembelajaran dalam pendekatan saintifik, (g) Merumuskan hasil integrasi menjadi indikator-indikator pembelajaran dalam pendekatan saintifik, dan (h) Menyusun program pembelajaran (silabus dan RPP).

Pengintegrasian Nilai ESD ini ini disusun untuk dapat diadopsi dan dikembangkan oleh guru dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Kemudian selanjutnya peneliti menyusun pemetaan integrasi materi, metode, media/sumber dan penilaian yang terangkum dalam RPP berdasarkan kurikulum 2013.



Gambar 2. Perencanaan Model Pembelajaran PPKn Berbasis ESD
(Sumber : Anggraini, 2016)

Pelaksanaan

Pelaksanaan proses belajar mengajar dalam pembelajaran PPKn yang menggunakan materi ESD dilaksanakan secara berkala disesuaikan dengan jadwal pelajaran PKN di kelas eksperimen. Proses pembelajaran terdiri dari kegiatan awal (pendahuluan), kegiatan inti, dan penutup. Rangkaian proses pembelajaran ini menjadi satu kesatuan dalam menerapkan materi ESD di kelas. Proses belajar mengajar diadakan selama 4 pertemuan dengan rangkaian jadwal yang tersusun dalam RPP.

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran PPKn baik kelas kontrol maupun eksperimen yaitu dengan pendekatan Saintifik sesuai kurikulum 2013 yang di dalamnya terdapat proses: 1) Pemberian rangsangan/mengamati; 2) Mengidentifikasi masalah/menanya; 3) Pengumpulan data/Mengumpulkan informasi; 4) Pengolahan data dan verifikasi/Mengasosiasikan, dan 5) Generalisasi/Mengkomunikasikan. Pendekatan sintifik ini menggunakan strategi/model pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) dan pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*). Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini, meliputi ceramah bervariasi, diskusi kelompok, VCT (*Value Clarification Technique*) analisis video, metode STAD, metode Pembelajaran Berbasis Budaya, dan Metode Penelitian Sosial.

ESD berlaku untuk setiap orang, dan pada setiap tahapan kehidupan dimana masing-masing orang menemukan diri mereka. Oleh karena itu, ESD berlaku dalam sebuah perspektif belajar sepanjang hidup (*lifelong learning*), mencakup semua ruang lingkup belajar yang memungkinkan, baik formal, non-formal dan informal, serta dimulai dari usia dini hingga sampai pada usia dewasa. ESD menuntut reorientasi pendekatan pendidikan, struktur dan isi kurikulum, pedagogi dan sistem ujian. ESD yang telah dijelaskan oleh Balitbang Depdiknas (2009) setidaknya harus mendemonstrasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Lintas disiplin dan holistik/menyeluruh; belajar untuk pembangunan berkelanjutan harus terca-

kup di dalam semua kurikulum, bukan sebagai subjek yang terpisah.

2. Nilai pendorong; penting bahwa norma-norma, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang dimiliki bersama dapat menopang pembangunan berkelanjutan dan harus dibuat eksplisit mungkin sehingga dapat diukur, diuji, diperdebatkan dan diaplikasikan.
3. Berpikir kritis dan pemecahan masalah; menuntun pada kepercayaan dan keyakinan untuk mengatasi dilema dan kebingungan serta tantangan dalam pembangunan berkelanjutan.
4. Multi-metode; puisi, drama, debat, pengalaman dan lain-lain, adalah pedagogi-pedagogi yang berbeda yang menjadi model proses dalam ESD. Pengajaran yang hanya mentransfer pengetahuan sudah seharusnya diganti dengan pendekatan para guru dan murid bekerja bersama untuk mencari pengetahuan dan memainkan peranan penting membangun lingkungan dalam institusi pendidikan mereka.
5. Pengambilan keputusan secara partisipatif; murid berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana mereka harus belajar.
6. Dapat diterapkan (*applicable*); pengalaman belajar menawarkan terintegrasinya kehidupan personal dan profesional dari hari ke hari.
7. Relevan secara lokal; mengkaji masalah dan isu baik lokal maupun global menggunakan bahasa yang digunakan oleh peserta didik (Balitbang Depdiknas, 2009, hlm. 8)

Berdasarkan asumsi di atas, maka penulis dapat memandang bahwa Indonesia sebagai negara yang ikut berkomitmen dalam pemulihan isu global tersebut maka secara tidak langsung melalui pendidikan perlu secara lebih luas dan komprehensif dalam mengembangkan misi pembangunan berkelanjutan. Fokus pengembangan dapat dilakukan melalui berbagai ranah pendidikan baik pendidikan formal, informal dan non formal. Pendidikan formal yang menjadi

unsur utama pembentukan sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia saat ini hingga kebutuhan yang akan datang. Melihat konten/isi pendidikan sendiri meliputi beberapa komponen yang hendaknya dilakukan yaitu pendekatan pendidikan, struktur dan isi kurikulum, pedagogi dan sistem ujian. Kesemua komponen tersebut dalam ESD sendiri sudah terorganisasi secara nyata sehingga menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan.

Evaluasi

Evaluasi pembelajaran PPKn dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penilaian autentik (*authentic assessment*). Penilaian autentik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian produk, dan penilaian diri. Penilaian sikap untuk mengetahui kemampuan *civic disposition* siswa, penilaian tertulis untuk mengetahui kemampuan *civic knowledge* siswa, dan penilaian unjuk kerja serta penilaian produk digunakan untuk mengetahui kemampuan *civic skill* siswa. Adapun penilaian dalam bentuk pretest dan posttest untuk mengukur pengaruh penerapan materi ESD dalam pembelajaran PPKn terhadap *civic competences* siswa.

Pengaruh Model ESD terhadap Kompetensi Kewarganegaraan

Kompetensi kewarganegaraan adalah pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan siswa yang mendukungnya menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Branson (1999:8-9) menegaskan tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

The National Standards for Civics and Government (Center for Civic Education, 1994) merumuskan komponen-komponen utama *civic competences* yang merupakan tujuan *civic education* meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*).

The National Council for the Social Studies atau NCCS (Somantri, 1972:9), menekankan bahwa “*citizenship education*” sesungguhnya mencakup “*all positive influence coming from formal and informal education*” atau segala macam dampak (positif) yang

diperoleh baik dari sekolah formal maupun informal. Jadi istilah “*civics* dan *civic education*” cenderung digunakan untuk mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Sedangkan “*citizenship education*” lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk menunjukkan “*instructional effects*” dan “*nurturant effect*” dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik (Winataputra, 2001: 127).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan model *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn (X) terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa (Y), maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*. Hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut: “Terdapat penerapan model *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa”. Adapun hasil pengujian dengan menggunakan SPSS diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Korelasi Variabel X dan Y

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.696**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	34	34
Y	Pearson Correlation	.696**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	34	34

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel di atas diperoleh besar hubungan antara penerapan model *Education for Sustainable Development* (X) dengan peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa (Y) sebesar 0,696 dengan nilai 0,000. Karena nilai sig. (2-tailed) = 0,000 < α = 0,05; maka hipotesis penelitian diterima: yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan model *Education for Sustainable Development* dengan peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa.

Selain itu, untuk mengetahui besaran pengaruh atau kontribusi penerapan materi *Education for Sustainable Development* terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Uji Regresi antara Variabel X dan Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 ^a	.484	.468	4.268

a. Predictors: (Constant), X

Merujuk tabel di atas mengandung arti bahwa penerapan model *Education for Sustainable Development* dapat memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar $(r)^2 = 0,696^2 = 48,6\%$ terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa. Faktor lainnya

sebesar (100-48,6) % atau 51,4 % misalnya faktor peranan guru, sifat atau watak siswa, kebiasaan, lingkungan (keluarga, masyarakat, sekolah), dan lain lain.

Berdasarkan temuan empiris yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan materi *Education for Sustainable Development* terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa, menghasilkan beberapa informasi berikut. *Pertama*, berkenaan dengan meningkatnya *civic disposition* siswa yang dipengaruhi variabel di atas, maka setiap siswa dalam pembelajaran PPKn secara tidak langsung mendapatkan pendidikan karakter baik secara utuh (holistik) yang dilaksanakan dengan menggunakan materi *Education for Sustainable Development*. Materi tersebut mampu mengkonstruksi cara pandang, cara berpikir dan bersikap siswa dengan seluruh aktivitas pembelajaran. Hal ini sejalan bahwa watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010, hlm. 6).

Kedua, berkenaan dengan meningkatnya *civic knowledge* siswa yang dipengaruhi variabel di atas, model pembelajaran ESD dengan menyisipkan materi-materi global dan diintegrasikan dengan menggunakan pendekatan menggabungkan konsep-konsep bahan yang ada secara keseluruhan ke dalam bahan ajar yang utuh (*holistic*) dalam proses pembelajaran PPKn yang dilakukan mulai dari materi, model, media, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran. Hal ini berfungsi sebagai pengembangan orientasi materi PPKn yang berpijak pada bahan kajian PPKn bersifat kontemporer, dimana selalu diperlukan adanya inovatif dan kreativitas pengembangan dalam hal materi dan metode pembelajaran (Widodo, 2010).

Ketiga, berkenaan dengan meningkatnya *civic skill* siswa yang dipengaruhi variabel di atas, model pembelajaran ESD mampu mengarahkan siswa agar berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan warga negara yang memahami tentang kesadaran warga negara masa depan. Indikator yang nampak pada peserta didik di antaranya: a) Sopan santun, disiplin pribadi, ketekunan, kepedulian terhadap kepentingan umum, menghormati orang lain, dan sifat-sifat lain yang berhubungan dengan kewarganegaraan yang dapat dikembangkan melalui kegiatan belajar yang kooperatif; b) Tanggung jawab pribadi, menghargai prestasi diri, dan mengeksplorasi diri yang dapat dipupuk di sekolah dan proyek-proyek belajar, seperti pelaksanaan habituasi di kelas terkait dengan kesetaraan gender, penciptaan lingkungan belajar yang bersih dan sehat, dan mengembangkan proyek budaya kewarganegaraan; c) Pengenalan terhadap nilai-nilai bersama (nilai keberlanjutan) serta kepedulian terhadap

masyarakat sekitar dapat didorong melalui presentasi yang telah dicapai oleh teman sekelas, melakukan pengamatan-pengamatan sosial, dan melakukan gerakan-gerakan kepedulian di sekolah; d) Kepedulian terhadap urusan-urusan publik dapat didorong melalui diskusi-diskusi teratur mengenai pentingnya kejadian-kejadian actual yang sedang berlangsung; e) Perenungan mengenai masalah-masalah etis dapat terjadi manakala siswa diminta untuk mengevaluasi, mengambil atau mempertahankan suatu pendapat; f) Kepekaan kewarganegaraan dapat ditingkatkan dengan mendiskusikan isu-isu yang sedang berkembang dengan para siswa, serta menyediakan peluang bagi siswa untuk mengamati langsung dan atau berpartisipasi di dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan (Branson, 1999, hlm. 23).

Kesimpulan

Secara konseptual, model *Education Sustainable Development* merupakan sistem aktivitas pengembangan sumber daya manusia secara sadar melibatkan generasi satu dengan generasi lainnya yang mencakup keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*), keberlanjutan sosial (*social sustainability*), keberlanjutan budaya (*cultural sustainability*), dan keberlanjutan ekologi (*ecology sustainability*). Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui sistem pendidikan dalam sebuah perspektif belajar sepanjang hidup (*lifelong learning*) dimulai dari usia dini hingga sampai pada usia dewasa. Model ESD menuntut reorientasi pendekatan pendidikan yang mencakup struktur atau isi kurikulum, tujuan, metode, dan evaluasi. Berdasarkan temuan empiris yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan materi *Education for Sustainable Development* terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa sebesar 48,6%. Secara sistemik, pendidikan pembangunan berkelanjutan untuk pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam pembelajaran PPKn mampu mengembangkan pengetahuan yang segar (*civic knowledge*) bagi siswa, mengembangkan bakat yang ada dan menyampaikan keterampilan yang berguna (*civic skill*), sehingga dapat membantu peserta didik mengembangkan jenis kualitas hidup yang melibatkan rasa hormat tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk sumber daya, fauna dan flora yang ada di planet ini (*civic disposition*).

Daftar Pustaka

- Anggraini, D. N. (2016). Integrasi Materi Education Sustainable Development (ESD) Dalam Bahan Ajar PPKn Untuk Peningkatan Karakter Siswa SMP. *Prosiding Seminar Internasional Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung, 15-16 November 2016.
- Balitbang, Depdiknas. (2009). *Strategi Nasional Pelaksanaan ESD*. Jakarta. Pusat Penelitian

- Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Creswell, J.W. (1944). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London & New Delhi: Sage Publications.
- Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. (1993). *How to Design and Evaluate in Research*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc
- Dimiyati, M. (1989). *Landasan Kependidikan: Suatu pengantar Pemikiran Keilmuan tentang Kegiatan Pendidikan*. Pascasarjana. IKIP Malang
- Jutvik, G., & Liepina, I. (2007). Education for change. A handbook for teaching and learning sustainable development. Retrieved February 26, 2013.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Grand Design Pendidikan Karakter - Draft-Revisi 25 Februari 2010*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). *Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD) melalui Kegiatan Intraurikuler*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). *Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD) Pokok-
Pokok Materi ESD*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: an International Comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Olibie & Akudulo. (2013). Toward a Functional Citizenship Education Curriculum in Nigerian Colleges of Education for Sustainable Development in the 21st Century. *American International Journal of Contemporary Research*. Vol. 3 No. 8; August 2013.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung : Alfabeta.
- Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Tjokrowinoto, M. (2002). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Cetakan IV. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- UNESCO. (2009). Laporan Dunia UNESCO Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antarbudaya. Tersedia di: <http://www.unesco.org/en/world-reports/cultural-diversity>. [Diakses 20 September 2014]
- Widodo, M. (2010). Pengintegrasian Perkembangan dan Isu-Isu Global ke dalam Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kerangka Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Prospektus*, Tahun VIII Nomor 2, Oktober 2010.
- Winataputra. U. S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*. Disertasi Program Pascasarjana UPI: Tidak diterbitkan.